**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SISTEM ZONASI UNTUK SMP NEGERI DI KECAMATAN TEMBALANG DAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF *PUBLIC VALUE***

Veronika Shinta Damayanti, Retna Hanani

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

One of the challenges in improving the quality of human resources through education is ensuring equal access to education. The PPDB zoning system policy has helped expand opportunities and access to educational rights. This study aims to analyze the implementation of the new student admissions policy for the zoning system for public junior high schools in Tembalang District and Semarang Tengah District, Semarang City. This study uses the public value theory according to Moore (1995) by looking at legitimacy and support, operational capabilities, and substantial values (social, political, economic, and educational values). This study is qualitative with data collection methods carried out through interviews, observations, literature studies through primary and secondary data sources. The research findings show that the implementation of this policy has been carried out in accordance with applicable provisions and procedures. However, there are several obstacles such as disparities in facilities between schools, inconsistent changes in SOPs, and low public interest in choosing private schools. In conclusion, the implementation of this policy is supported by the variables of legitimacy and support, operational capabilities, and substantial values (social, political, economic, and educational values). This study recommends optimizing data verification and equalizing facilities between schools, involving all implementing institutions in determining SOPs, and optimizing the role of private junior high schools.

Keywords: Policy Implementation; PPDB Policy; Zoning System

ABSTRAK

Salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah memastikan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi telah membantu memperluas kesempatan dan akses terhadap hak pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori *public value* menurut Moore (1995) dengan melihat legitimasi dan dukungan, kemampuan operasional, serta nilai substansial (nilai sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur melalui sumber data primer serta sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala seperti ketimpangan fasilitas antar sekolah, perubahan SOP yang belum konsisten, serta rendahnya minat masyarakat untuk memilih sekolah swasta. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ini didukung oleh variabel legitimasi dan dukungan, kemampuan operasional, serta nilai substansial (nilai sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan). Penelitian ini merekomendasikan adanya optimalisasi verifikasi data dan penyamarataan fasilitas antarsekolah, melibatkan seluruh lembaga pelaksana dalam penetapan SOP, serta optimalisasi peran SMP swasta.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kebijakan PPDB; Sistem Zonasi

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mendukung proses pembangunan di negara. Sebagai landasan utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas yakni kunci dalam menghadapi tantangan global dan memajukan masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mengembangkan kualitas pendidikan adalah menerapkan kebijakan PPDB yang efektif. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan PPDB melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam upaya pemerataan pendidikan diperlukan sistem zonasi untuk meningkatkan keterjaminan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Zonasi pendidikan menjadi salah satu pendekatan yang dirancang untuk mempercepat tercapainya pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tahun 2024 ini sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.

Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi pada SMP di Kota Semarang mengacu pada Peraturan

Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, ataupun bentuk lain yang sederajat. Kuota PPDB pada tingkat SMP Negeri di Kota Semarang yaitu jalur zonasi 50% dari kapasitas tiap sekolah, jalur afirmasi, 15% dari kapasitas tiap sekolah, jalur mutasi orangtua/wali 5% dari kapasitas sekolah, sedangkan koutas untuk jalur prestasi ditentukan jika terdapat sisa dari kapasitas sekolah.

Sistem zonasi merupakan salah satu pendekatan dalam PPDB yang mengatur bahwa penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal (Mursak,2023). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, tanpa harus dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau status sosial. Dengan sistem zonasi, sekolah-sekolah tidak lagi bisa hanya menerima siswa-siswa berprestasi tinggi atau yang berasal dari keluarga berekonomi rendah, tetapi juga harus menerima siswa dari berbagai latar belakang yang berada di sekitar zona sekolah tersebut (Rini Werdiningsih, 2023). Maka ketersediaan sekolah negeri sangat menentukan kapasitas sekolah dalam menampung calon peserta didik.

Tabel 1 Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta
Mijen	3	9
Gunung Pati	3	12
Banyumanik	4	14
Gajah Mungkur	2	7
Semarang Selatan	4	6
Candisari	2	7
Tembalang	4	15
Pedurungan	4	12
Genuk	3	6
Gayamsari	1	7
Semarang Timur	2	9
Semarang Utara	1	7
Semarang Tengah	5	13
Semarang Barat	4	15
Tugu	1	4
Ngaliyen	3	5
Jumlah	46	148

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa persebaran sekolah negeri di Kota Semarang ini kurang merata, pada kecamatan Semarang Tengah terdapat 5 sekolah negeri, sedangkan di kecamatan Gayamsar, Semarang Utara, dan Tugu hanya terdapat 1 sekolah negeri. Maka dalam hal ini menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang dengan jumlah sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kebijakan PPDB Kota Semarang pada tahun 2024 ini memiliki daya tampung peserta didik pada jenjang SMP Negeri hanya sebanyak 11.456 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar peserta didik pada jenjang SMP Negeri sebanyak 33.449 siswa, dengan rincian jumlah pendaftar jalur

zonasi 23.038 siswa, jalur prestasi 5.976 siswa, jalur afirmasi 4.393, dan jalur mutase sebanyak 42 siswa. Maka berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan terdapat lebih dari 21.000 ribu siswa yang gagal masuk SMP Negeri di Kota Semarang. Terbatasnya daya tampung serta ketersediaan jumlah sekolah negeri menjadi persaingan yang ketat di antara para calon siswa.

Kebijakan PPDB dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terdapat persyaratan usia calon siswa pada tingkat SMP yaitu berumur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 juli pada tahun 2024. Dengan adanya seleksi berdasarkan usia dalam PPDB sistem zonasi juga sering menjadi permasalahan dengan usia yang selisih satu bulan dengan pesiang lainnya memiliki peluang lebih besar, sehingga banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi dikarenakan berusia muda.

Namun kebijakan PPDB ini juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk umur sekolah di setiap jenjang untuk mengetahui kebutuhan sekolah serta daya tampung yang dibutuhkan di setiap wilayah kecamatan. Target sasaran kebijakan PPDB pada jenjang SMP yakni penduduk dengan usia 12-15 tahun.

Tabel 2 Perbandingan Jumlah SMP Negeri, Daya Tampung Siswa dan Jumlah Penduduk Kelompok 12-15 Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah SMP Negeri	Daya Tampung Tiap Sekolah	Kelompok Usia 12-15
1.	Semarang Tengah	5	1.248	664
2.	Semarang Timur	2	544	883
3.	Semarang Selatan	4	1.056	854
4.	Semarang Utara	1	256	1.697
5.	Semarang Barat	4	1.056	2.025
6.	Mijen	3	640	1.252
7.	Gunung Pati	3	736	1.534
8.	Banyumanik	4	1.056	1.821
9.	Gajah Mungkur	2	544	745
10.	Candisari	2	544	1.035
11.	Tembalang	4	992	2.963
12.	Ngaliyan	3	640	2.122
13.	Pedurungan	4	1.088	2.816
14.	Genuk	3	544	1.876
15.	Gayamsari	1	256	1.063
16.	Tugu	1	256	524
	Jumlah	46	11.456	33.449

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 2024

Kecamatan Tembalang di Kota Semarang menghadapi ketimpangan signifikan dalam persebaran SMP Negeri, terutama bila dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Semarang Tengah. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan, yang mana siswa di Tembalang harus menghadapi persaingan ketat dan keterbatasan fasilitas, sedangkan siswa di Semarang Tengah memiliki pilihan yang lebih luas dan daya tampung yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang tidak adil dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan negeri antara dua kecamatan tersebut.

Di Kota Semarang terdapat SMP Swasta yang menerima subsidi dari pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Namun, SMP Swasta yang menerima subsidi masih

menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal tenaga pengajar, fasilitas, serta metode pembelajaran. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antar-sekolah juga menjadi tantangan besar yang menghambat pemerataan akses pendidikan.

Selaras dengan permasalahan diatas, Batasan penelitian ini hanya menganalisis SMP Negeri saja karena peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi untuk SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ditinjau dari perspektif *public value*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, bersama dengan subjek penelitian Dinas Pendidikan Kota Semarang. Data primer didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui situs resmi dari kemendikbud, jurnal, sosial media Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian di analisis yang dilakukan melalui tahap, yaitu : 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan Kesimpulan. Mengukur kualitas data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan menganalisis menggunakan teori *public value* yang dikemukakan oleh Moore (1995) yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu segitiga strategis yang meliputi legitimasi dan dukungan, kemampuan operasional, serta nilai substansial.

Legitimasi dan Dukungan

Legitimasi dan dukungan, mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau program publik. Dalam konteks kebijakan PPDB sistem zonasi, legitimasi dapat diperoleh melalui regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa secara transparan dan adil. Dalam keberlangsungan PPDB sistem zonasi tahun 2024/2025 di Kota Semarang terdapat 3 regulasi yang menjadi landasan yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 47 Tahun 2023, dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024. Kemudian dalam proses pelaksanaan PPDB agar masyarakat dapat memahami alur pendaftaran terdapat regulasi yang mengatur yakni dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor 421.7/2024 tentang alur pendaftaran, penetapan jadwal pelaksanaan, penetapan lingkungan sekolah, alur pengesahan piagam prestasi dalam penerimaan siswa baru di Kota Semarang tahun ajaran 2024/2025.

Sementara itu, dukungan mengacu pada keterlibatan dan penerimaan aktif dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Dukungan masyarakat bisa muncul ketika mereka merasa bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait kebijakan PPDB sistem zonasi disampaikan secara luas, transparan, dan mudah dipahami agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif serta diterima oleh masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, yang semakin memperkuat dukungan terhadap sistem zonasi.

Kemudian dukungan dari para pemangku kepentingan juga merupakan

hal yang penting untuk membantu serta mempermudah selama proses PPDB berlangsung. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang berkolaborasi oleh beberapa stakeholder seperti dinas sosial, bappeda, dukcapil, serta kominfo. Dengan demikian, regulasi yang ditetapkan mendapat dukungan dari beberapa stakeholder serta regulasi PPDB tahun 2024/2025 ini telah dapat meratakan akses pendidikan di Kota Semarang terutama pada kecamatan tembalang dan semarang tengah.

Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait mampu mengelola sumber daya dan proses pelaksanaan kebijakan ini secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya sarana dan prasarana.

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi untuk SMP Negeri, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebagai upaya yang strategis dan operasional untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tenaga kerja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini, baik di tingkat pemerintah daerah maupun sekolah. Pengelolaan

SDM melibatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kerja terutama pada panitia PPDB dalam menjalankan kebijakan PPDB sistem zonasi.

Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh admin atau panitia PPDB di setiap sekolah. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan panitia di setiap satuan pendidikan memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur, aturan, dan teknis pelaksanaan PPDB.

Bimtek dalam kebijakan PPDB mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan nilai bagi publik dengan memastikan pelayanan pendidikan berjalan secara adil, efisien, dan akuntabel.

2. Pengelolaan Sumber Daya Finansial

Pengelolaan sumber daya finansial dalam kebijakan PPDB sistem zonasi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaannya. Dalam kebijakan ini, pengelolaan dana mencakup berbagai kebutuhan, seperti pendanaan untuk sistem teknologi informasi, pelatihan panitia, sosialisasi kebijakan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah, melalui Dinas

Pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi penggunaan anggaran dengan efisien dan transparan, sehingga setiap kebutuhan yang muncul dalam PPDB dapat terpenuhi.

Sumber dana yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pelaksanaan PPDB berasal dari APBD Kota Semarang. Sedangkan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB di setiap sekolah berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan teknis seperti operasional sistem PPDB online hingga publikasi informasi terkait proses pendaftaran.

Pengelolaan sumber daya finansial yang sesuai dengan anggaran dalam kebijakan PPDB sistem zonasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan public value.

3. Pengelolaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya agar bisa berfungsi secara optimal. Keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang tersedia. Sumber daya sarana dan prasarana memegang peranan

penting dalam pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi.

Pemerintah melalui dinas pendidikan daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sekolah, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran, memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur ini. Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan pengadaan sumber daya sarana dan prasarana salah satunya yakni pengadaan sarana komunikasi. Sarana komunikasi ini berfungsi sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pihak dinas selama proses PPDB berlangsung.

Pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana ini juga termasuk memastikan bahwa sarana utama seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga harus tersedia untuk menampung jumlah siswa yang disesuaikan dengan distribusi populasi di setiap zona.

Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Semarang telah merencanakan penambahan sekolah baru sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana dalam kebijakan pendidikan, khususnya dalam mendukung sistem zonasi PPDB. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi

seperti Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Tembalang.

Rencana akan melakukan pembangunan 3 SMP Negeri yaitu SMPN 46 di Kecamatan Genuk, SMPN 47 di Kecamatan Semarang Timur, serta SMPN 49 di Kecamatan Pedurungan. Langkah strategis ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan melihat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, memastikan bahwa setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terhambat oleh faktor geografis ataupun kepadatan penduduk.

Nilai Substansial

Nilai substansial menunjukkan seberapa jauh kebijakan tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam permasalahan ini teori *public value* menurut Mark Moore (1995) Nilai substansial mencakup dampak kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat dari segi nilai sosial, politik, ekonomi, serta nilai pendidikan.

1. Nilai Sosial

Dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi nilai sosial memegang peran penting terutama dalam menciptakan keadilan dan pemerataan akses pendidikan

bagi masyarakat. Dalam kebijakan ini, nilai sosial tercermin melalui upaya pemerintah memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, mempunyai peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Dalam jalur zonasi ini terdapat 3 nilai terkandung yakni nilai usia calon siswa (maksimal 15 tahun), nilai jarak tempat tinggal, dan nilai lingkungan. Nilai jarak tempat tinggal dihitung berdasarkan zona, jika berada dalam zona atau zona 1 maka akan mendapatkan nilai 50 dan yang berada di luar zona atau zona 2 akan mendapatkan nilai 40. Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam lingkup 1 RT dengan sekolah yang ditunju mendapatkan nilai tambahan atau disebut nilai lingkungan sebesar 3 poin. Dengan adanya nilai lingkungan ini memberikan keadilan dan memprioritaskan siswa yang berada di kawasan sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan.

Penerapan nilai lingkungan menggambarkan bentuk nilai sosial dalam teori *public value*, yang berfokus pada pemerataan akses dan keadilan sosial dalam layanan publik. Melalui kebijakan zonasi ini, pemerintah meningkatkan solidaritas sosial dengan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar, menjadikan sekolah sebagai bagian

integral dari kehidupan sosial komunitas tersebut.

2. Nilai Politik

Nilai politik yang terlihat dalam kebijakan PPDB sistem zonasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB sistem zonasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang melibatkan pihak sekolah seperti kepala sekolah dan panitia PPDB pada diskusi dengan stakeholder terkait serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Wujud transparansi terhadap masyarakat, pemerintah Kota Semarang melaksanakan PPDB melalui website resmi ppd.semarangkota.go.id. Platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan memastikan bahwa seluruh proses PPDB berjalan secara terbuka. Mulai dari tahap pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan, verifikasi data, hingga pengumuman hasil seleksi, semua dilakukan melalui website tersebut.

Penerapan teknologi dalam PPDB, mencerminkan implementasi nilai politik dalam teori public value, yang berkaitan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

3. Nilai Ekonomi

Dalam pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi, nilai ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak sekolah. Dalam sistem zonasi, mengutamakan jarak rumah ke sekolah, berkontribusi pada pengurangan biaya transportasi bagi keluarga. Orang tua tidak lagi harus membayar ongkos perjalanan mahal karena anak-anak diterima di sekolah terdekat, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih hemat.

Dengan penempatan sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal siswa, orang tua tidak lagi harus mengatur waktu atau mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi jarak jauh serta membantu keluarga yang memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan atau yang menghadapi kendala finansial.

Nilai ekonomi dalam Kebijakan sistem zonasi pada PPDB ini sejalan dengan teori public value mengarah pada prinsip keadilan yang menjadi pilar utama dalam teori public value. Dengan memberikan akses yang setara bagi semua

siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, kebijakan zonasi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi siswa berlatar belakang ekonomi rendah tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan.

4. Nilai Pendidikan

Pemerintah melalui kebijakan PPDB sistem zonasi mendorong peningkatan mutu pendidikan di semua sekolah, baik dari segi sarana, prasarana, maupun kualitas pengajaran. Sistem zonasi ini berupaya menghilangkan stigma terhadap "sekolah favorit" yang selama ini memunculkan ketimpangan akses dengan memastikan bahwa siswa dapat bersekolah di sekolah negeri yang berada di dekat rumah mereka, tanpa adanya hambatan jarak atau kebutuhan bersaing berdasarkan prestasi semata.

Kebijakan zonasi PPDB telah memberikan dampak signifikan dalam mengubah stigma yang sebelumnya melekat pada beberapa sekolah, termasuk SMPN 33 Semarang yang berada di Kecamatan Tembalang. Sebelumnya, sekolah ini sempat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai "sekolah buangan". SMPN 33 Semarang kini berhasil meraih akreditasi yang lebih baik dan telah berkembang menjadi salah satu sekolah

yang maju. Dengan adanya kebijakan zonasi, stigma terhadap sekolah-sekolah tertentu perlahan mulai hilang, karena kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri menjadi lebih merata.

Nilai pendidikan dalam kebijakan PPDB sistem zonasi ini secara keseluruhan mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam teori *public value*, yaitu menciptakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, mengedepankan keadilan, serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu juga menghasilkan dampak positif dengan mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah telah memberikan dampak signifikan dalam konteks *public value*, terutama dalam aspek keadilan, aksesibilitas, dan pemerataan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam ketidakseimbangan daya tampung SMP Negeri di beberapa wilayah. Dari perspektif *public value*, keadilan dalam kebijakan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek

kesetaraan kualitas pendidikan antar sekolah negeri serta integrasi dengan sekolah swasta.

Secara keseluruhan, kebijakan PPDB sistem zonasi telah mencerminkan nilai keadilan dalam pemerataan akses pendidikan, tetapi belum sepenuhnya memberikan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan zonasi tidak hanya menciptakan keadilan dalam aspek aksesibilitas, tetapi juga dalam hal mutu pendidikan yang diterima oleh seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran terkait kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kota Semarang, yaitu:

1. Dalam pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu mempertimbangkan penambahan jumlah SMP negeri di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas.
2. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu menetapkan SOP yang berlaku dalam jangka panjang guna menghindari perubahan aturan setiap tahun.

3. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu meningkatkan kualitas pendidikan SMP swasta dengan meningkatkan akreditasi sekolah swasta. Sehingga siswa yang tidak diterima di SMP Negeri berminat mendaftarkan diri di SMP Swasta.
4. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu standarisasi fasilitas antar sekolah agar tidak terjadi ketimpangan antar sekolah. Penyamaraan fasilitas menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
5. Perlu diterapkan kebijakan rolling guru dari SMP Negeri ke SMP Swasta gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.
6. Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menetapkan persyaratan seleksi PPDB sistem zonasi perlu mempertimbangkan wilayah-wilayah dengan daya tampung sekolah yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SLTP Sederajat di Kota Banjarmasin (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Kota Banjarmasin). 6.
- Dian Purwanti. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan* (Safrinal (ed.)). CV. Azka Pustaka.
- Dr. franky Djafar, S.Ap, S.Pd, M. S. (2024). *Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis dan Penerapan*. Media Nusa Creativ.
- Dr. Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Dr. Sutoyo (ed.)). UNISRI Press.
- Gede Danu Setiawan, & Ni Luh Yaniasti. (2021). Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi Dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 3(2), 183–193.
- Habibi, A. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Lembaga Di Lembaga Pendidikan. *Taklimuna: Journal of Education and Teaching*, 1(1), 1–11.
- Hanafi, M. I., & Endarti, E. W. (2024). Peserta Didik Baru di Kabupaten Gresik (Studi Kasus UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik) No . 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, wilayah di Indonesia seperti yang terlampir dalam website resmi k. 4.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 73–86.
- Hayanuddin, H., Parawangi, A., & Syukri. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sman 4 Wajo. *Jurnal Unismuh*, 5, 65–77.
- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 128–135.
- Indri Novrijayanti, & Yulia Wiji Astika. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(3).
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2019). Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut Abstrak. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11.
- Khairil Aftar, Ahmad Lahmi, & Rahmi. (2021). Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Dampaknya terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Lubuk Sikaping. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), 58–68.
- Kussetyaningsih, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255.
- Lestari, E., & Yanti, N. (2024). Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP DI Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46). *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 19(1), 69–88.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Mursak, M. (2023). Implementasi Sistem

Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 61–70.

Nugroho, D. R. (2018). *Public Policy* (Yulian Masda (ed.)). PT. Elex Media Komputindo.

Rachmawati, E., Wandy, Y., & Kamil, R. I. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 87–95.

Rifqiati. (2023). *Pengelolaan Sumber daya Finansial dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta Timur*. 6, 4134–4149.

Rini Werdiningsih. (2023). Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah). *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 261–267.

Rodhiyatussolichah, L. (2024). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo. *Emergent Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(1), 12.